

# **Skripsi**

## **STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE**

**Disusun dan disusulkan oleh**

**HAFSA SADIA**

**Nomor Stambuk: 105640181813**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS  
PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BONE**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

**HAFSA SADIA**

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## **PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan  
Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas  
Pendidikan Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : HAFSA SADIA

Nomor Stambuk : 105640181813

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Abdul Mahsyar, M.Si**

**Drs. Alimuddin Said, M.Pd**

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M. Si**

**Dr. Nuryanti Mustari , S.IP,M.Si**

## **PENERIMAAN TIM**

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1219/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) dalam program Sudi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 11 Agustus 2018.

## **TIM PENILAI**

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M. Si

Dr. Burhanuddin, S. Sos, M. Si

## **PENGUJI**

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M. Si ( )
2. DR. Abdul Mahsyar, M. Si ( )
3. Dr. Amir Muhiddin, M. Si ( )
4. Dr. Muhammad Tahir, M. Si ( )

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : HAFSA SADIA

Nomor Stambuk : 105640181813

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penulisan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melaksanakan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 09 April 2018

Yang Menyatakan,

**HAFSA SADIA**

## **MOTTO**

“Hidup layaknya sederetan kata yang hanya menyisahkan beberapa spasi, yang terkadang butuh koma untuk mengistirahatkan perjuangn kita, bahkan kadang muncul tanda tanya di saat kita kehilangan arah dan sesekali juga menghadirkan tanda seru ketika kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun kita harus sadar bahwa perjalanan hidup ini terkadang butuh peta dan catatan yang senantiasa memberikan petunjuk sebagai evaluasi kita. Tapi yakinlah bahwa titik bukanlah akhir dari segalanya karna masih banyak kata yang yang harus kita untaikan menjadi sebuah lembar kehidupan yang indah”

Penulis persembahkan kepada:

Almarhum Ibu dan Bapak saya tersayang dan tak tergantikan dan semoga tenang di alam sana dan kakak saya yang senantiasa menjadi motivator, membimbing mengarahkan dan dukungan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

## KATA PENGANTAR

**"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu"**

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi yang berjudul **"Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone"** dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulis maupun dari segi isi. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dala tahap penulisan. Namun dengan kesadaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari pihak, baik material maupun moral, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan yang baik ini pula penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT karena berkat nikmat dan izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa kepada nabi Muhammad SAW berkat beliau kita bisa lepas dari masa kebodohan ke masa yang berpendidikan seperti yang kita rasakan saat ini
2. Kedua orang tua saya ibu tercinta almarhum Andi Dika dan Petta Baji yang tak akan tergantikan oleh siapa pun yang telah melahirkan saya. Dan saya tak henti-hentinya mengingat almarhum tante saya Etta Dedo yang telah membesarkan saya dan mencurahkan kasih sayangnya pengorbanan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa seperti ini.
3. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I, yang telah mendidik, membantu dan mengarahkan penulis sehingga penyelesaian skripsi ini dan bapak Drs. Alimuddin Said, M. Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dan mengarahkan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya.
5. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya.
6. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi (SI).

7. Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, dan segenap staf dan masyarakat. Terimah kasih atas segala kerja sama dan bantuan yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian.
8. Seluruh keluarga besar terutama kepada kakak saya Andi Rafiuddin, S.Pd.I dan istrinya Khaeruni Basri, S.Pd, Andi Iwan, Murni, Andi Supriadi. S.Pd, Setiawati, Ufriana,S.Sos. Herianto, S.Pd, Andi Marlina, Andi Umar, Nurhayati, Andi Intang, Suaib, One, Iping, Muh. Said. Rusni, Fitriani,S.Pd, Andi Nganro, Suriyani, Andi Isa, Ansar, Andi Rosmiati Syail, Wati, Marhani,S.Pd, Sanre,S.Pd, Musni,S.Pd, dan Andi Ismail yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi, terimah kasih atas bantuan moril dan materi yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Seluruh keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan HIMJIP, teman-teman angkatan 2013 terkhusus bagi temen saya Apriyanti Pratiwi, Ria Angriani, Immaty Hasrullah, Sriana, Anitha Andriana, Lis Jumarni, Triyana yang selalu solid dari awal perkuliahan.
10. Terimah kasih buat teman-teman KKP Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi

penulis. Semua ini adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah disisi-Nya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terimah kasih.

**"Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu"**

Makassar, 09 April 2018

HAFSA SADIA

## ABSTRAK

**HAFSA SADIA (2013). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (Di bimbing oleh Dr. Abdul Mahsyar, M.Si dan Drs. Alimuddin Said, M.Pd)**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan faktor yang mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki dengan mengumpulkan data untuk di analisis. Lokasi penelitian berdasarkan pada judul yaitu di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari: Kepala Dinas 1 orang , Sekretaris 1 orang , Kepala Sekolah 1 orang , Ketua Komite 1 orang, dan orang tua siswa/Masyarakat 1 orang. Dalam melakukan analisis daa peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari : Reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas pendidikan gratis di Kabupaten Bone berjalan dengan baik dan hal yang menjadi pendukung strategi pendidikan gratis ini ialah pihak yang terkait dalam hal ini menjalin kerjasama yang baik dalam hal strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas serta sumber daya yang memadai dalam menjalankan program pendidikan gratis.

**Keyword:** Strategi . Pendidikan Gratis, Kapasitas

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep dan Teori .....	7
1. Pengertian Strategi .....	7
2. Pengertian Strategi Pengembangan Kapasitas .....	10
3. Konsep Good Governance .....	17
4. Program Pendidikan Gratis .....	23
B. Kerangka Pikir .....	27
C. Fokus Penelitian .....	29
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Informan Penelitian .....	34

E.	Teknik Pengumpulan Data .....	35
F.	Teknik Analisis Data .....	36
G.	Keabsahan Data .....	37

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Deskripsi Objek Penelitian .....	39
	1. Keadaan Umum Peta Kabupaten Bone .....	39
	2. Non Pendidikan .....	39
	3. Pendidikan .....	43
	4. Pendidikan Non Formal .....	51
	5. Visi dan Misi .....	52
	6. Struktur Organisasi .....	53
B.	Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone .....	55
	1. Peningkatan Pemerataan dan Akses Pendidikan .....	60
	2. Peningkatan Mutu .....	62
C.	Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone .....	67
	1. Faktor Pendukung .....	67
	2. Faktor Penghambat .....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	74
B.	Saran .....	75
	DAFTAR PUSTAKA .....	76

## **DAFTAR TABEL**

- 1.1. Data Informan
- 1.2. Administrasi Pemerintah Kabupaten Bone
- 1.3. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia
- 1.4. Keadaan Demografi
- 1.5. Keadaan Geografi
- 1.6. Data Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
- 1.7. Data Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah
- 1.8. Data Sekolah SMA, MA dan SMK

## **DAFTAR GAMBAR**

- 2.1 Bagan Kerangka Pikir
- 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Strategi secara umum adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, yakni pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Definisi ini disesuaikan dengan kata strategi berasal dari kata kerja bahasa Yunani *stratego* yang berarti merencanakan pemusnahan lewat penggunaan sumber-sumber yang efektif. Strategi dimaknai sebagai suatu cara atau kiat mencapai suatu tujuan tertentu.

Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) dihadapi dan yang akan mungkin di masa depan, guna mencapai efektifitas.

Berdasarkan substansi pasal tersebut jelas bahwa peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbentuk pembinaan dan fasilitasi pada 3 (tiga) aspek yakni kerangka kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia. Dalam praktiknya, telah banyak pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga internasional.

Adapun halnya yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bone dalam pengembangan kapasitas tersebut. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik, maka penting bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bone untuk

melaksanakan apa yang dimaksud dengan *capacity building* atau pengembangan kapasitas tersebut. Dengan dilatarbelakangi untuk melancarkan pembangunan atau pengembangan institusi pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan *capacity building* dengan tujuan memperbaiki dan memperbarui sistem yang ada agar lebih dari sebelumnya. Berdasarkan PP No. 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bone yang merupakan institusi pemerintahan daerah juga melaksanakan pengembangan kapasitas khususnya pengembangan kapasitas kelembagaan.. Di mana dalam hal ini, fokus dari pengembangan kapasitas ini di lakukan dengan cara melakukan ingkauan sistem yaitu ingkatan istem (kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan).

Kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah merupakan kebijakan publik desentralisasi (UU 32 Tahun 2004) di mana urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang di desentralisasikan sesuai kebijakan pendidikan nasional (UU No 20 Tahun 2003).

Sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional ada dua hal khusus yang berkenaan dengan hal tersebut adalah pertama menetapkan alokasi dana pendidikan baik pada APBN dan APBD, kebijakan pendidikan yang merupakan amanat dari UUD 1945 amandemen ke empat pasal 31 (4), kedua UU No 20 Tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerinah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga negara.

pemerintah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun.

Selain dengan adanya program pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang mengarahkan pada kebijakan pendidikan gratis sebagai salah satu program, tentunya melibatkan pemerintah di masing-masing kabupaten di Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Bone.

Mengingat sasaran dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bone sendiri adalah masyarakat kota. Sehingga, dengan adanya *capacity building* ini dapat memberikan hasil yang maksimal dalam hal pelayanan publik pendidikan .

Program Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana dengan adanya program pendidikan gratis tapi tidak berarti bahwa semuanya gratis , seperti seragam sekolah dan buku penunjang dan biaya transportasi masih tanggungan orang tua. Dan tidak ditanggung oleh pemerintah, biaya untuk memenuhi kebijakan pendidikan gratis adalah berupa subsidi. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya komitmen dan perhatian pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan. Pemerintah seharusnya dengan sungguh–sungguh melaksanakan langkah strategisnya yang menitikberatkan pada 3 hal pokok yaitu: Pertama peningkatan pemerataan dan akses pendidikan seluas-luasnya. Kedua, peningkatan mutu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga, peningkatan tersebut adalah pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Pemerintah juga seharusnya bekerjasama sesuai pihak yang terkait dengan kebijakan dan aturan pendidikan gratis.

Strategi adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir yang dikuif oleh Amir menggambarkan strategi pemerintah sebagai suatu cara yang dipilih organisasi untk diikuti dalam mencapai misinya sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu.

Strategi adalah suau hal yang penting dalam mencapai tujuan tertentu ini di kutif dari Ichsan strategi idealnya dipilih sesuai dengan karakter pendidikan dengan cara melaksanakan program pendidikan.

Strategi pemerinah yaitu strategi maksimal untuk digunakan analisis swot untuk mempercepat pengembangan kapasitas poensi pada bidang pendidikan di kutif dar Tahir.

Strategi merupakan sistem perencanaan sangat dibutuhkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan terkhusus di pelayanan pendidikan sebagai bentuk sarana dan prasarana penting dalam mobilitas masyarakat pada peneliian ini diukur tingkat kepuasan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dikuif dari Setiawati.

Berkaitan dengan hal di atas, akuntabilitas (pertanggungjawaban) penyelenggaraan program pendidikan gratis sangat penting bagi semua masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat masih menganggap bahwa program pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bone masih kurang memuaskan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul: "**Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone**"

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan bacaan referensi kajian dalam perspektif Ilmu Pengetahuan Kebijakan Publik, khususnya

dibidang Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

## 2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang khususnya terlibat dalam upaya pelaksanaan Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep dan Teori**

##### **1. Pengertian Strategi**

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratus* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Hindri Asmoko (2010:45) strategi pemerintah adalah menghubungkan antara konsep manajemen strategi pada sektor privat dengan aturan pengelolaan pemerintah daerah yang ada dalam perundang-undang di Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji literatur mengenai manajemen strategi dan konsep manajemen strategi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pengelolaan pemerintah. Setelah itu akan diuraikan alternatif pendekatan dalam manajemen strategi yang mungkin dapat diterapkan pada pemerintah di Indonesia.

Menurut Marrus (2011:31) strategi pemerintah adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (2011:31) mengartikan strategi pemerintah adalah suatu bentuk atau rancangan yang mengintegrasikan tujuan-tujuan

utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dan pada dasarnya strategi pemerintah merupakan berbagai tahapan dari jawaban yang optimal terhadap tantangan-tantangan baru yang mungkin dihadapi, baik sebagai akibat dari langkah sebelumnya maupun karena adanya tekanan dari luar.

Keseluruhan dari proses tersebut berada dalam suatu arah tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari awal. Dengan strategi pemerintah yang baik, maka perencanaan strategi akan berfikir dan memandang secara keseluruhan, sehingga akan cepat dan mudah bagi pemerintah untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategi yang muncul. Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi. Strategi ini adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk mencapai posisi yang strategis.

Menurut Kotler (2011:25) Strategi pemerintah adalah proses untuk mengembangkan dan menjaga keserasian antara tujuan pemerintah dan peluang besar yang terus berubah, dengan tujuan untuk membentuk dan menyesuaikan usaha pemerintah dan produk yang dihasilkan sehingga bisa mencapai tingkat perubahan.

Menurut Rangkuti (2008:21) strategi pemerintah adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar pemerintah dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Jadi, perencanaan strategi penting untuk

memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

Strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan banyak pihak yang berkepentingan. Strategi dapat dijadikan sebagai 4P, yaitu strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan dan strategi sebagai pola kegiatan. Sebagai perspektif, dimana strategi dalam membentuk misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi organisasi. Sebagai pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola yaitu umpan balik dan penyesuaian. Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai strategi, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi itu adalah rencana tentang serangkaian manuver yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Secara garis besar pengertian strategi adalah segala upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, baik dalam bidang pemerintahan atau lainnya. Strategi tersebut digunakan untuk meningkatkan segala usaha pada perkembangan lain yang lebih baik.

Sedangkan strategi dasar dari setiap usaha mencakup 4 hal yaitu pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi serta kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadikan sasaran usaha dengan memperhatikan aspirasi dan selera masyarakat, pertimbangan dan pemilihan jalan pendekatan yang ampuh dalam mencapai sasaran, pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencapai sasaran, pertimbangan dan penetapan tolak ukur yang baku untuk mengukur tingkat keberhasilan.

Untuk memahami konsep perencanaan strategi, kita perlu memahami pengertian konsep mengenai strategi.

## **2. Pengertian strategi pengembangan kapasitas**

Pengertian strategi pengembangan kapasitas memang secara terminologi masih ada perbedaan pendapat, sebagian orang merujuk kepada pengertian dalam konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan) sebagian lagi mengartikan kapasitas dalam konteks yang lebih luas termasuk di dalamnya soal sikap dan perilaku. Sebagian ilmuwan juga melihat pengembangan kapasitas sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing*

*capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*)

Beberapa pengertian menurut para ahli:

Menurut Riyadi Soeprapto, (2010:30) *capacity building* (pengembangan kapasitas) sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan

Menurut Brown (2010:25) *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Menurut Morison (2010:42) Peningkatan kapasitas dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang relevan. Merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

Dalam Buku *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance* yang ditulis oleh Riyadi Soeprapto, juga menyampaikan bahwa World Bank menekankan perhatian capacity building pada:

1. Pengembangan sumber daya manusia; training, rekrutmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis
2. Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen
3. Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal,
4. Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran.
5. Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan di berbagai tingkatan yang mencakup berbagai macam aspek, mulai dari sumberdaya manusianya maupun juga sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya.

**a. Tingkatan Pengembangan Kapasitas**

Upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan menurut Riyadi Soeprapto, yaitu sebagaimana diilustrasikan dengan tingkatan sistem dengan kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan

kebijakan yang ada pada program pendidikan gratis di dinas pendidikan kabupaten Bone. Dikemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 1 (satu) tingkatanyaitu:Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.

**b. Tujuan pengembangan kapasitas**

Secara umum tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut.Sedangkan dalam konteks pembangunan dewasa ini, tidak ada tujuan lain selain untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good governance*. Suatu kondisi pemerintahan yang yang dicita-citakan semua pihak yang mampu.

**c. Sasaran Pengembangan Kapasitas**

Upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks pembangunan, dimana dikenal pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan *good governance*, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah pilar *good governance* itu sendiri, yaitu:

1. Masyarakat di tingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subyek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri

2. Pemerintah harus menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas yang baik pula.
3. Swasta dan kelompok peduli lain untuk upaya pembangunan cukup dilakukan hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, bilamana merujuk pada tingkatan tersebut diatas, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui:

Pada Tingkatan individual, Secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dll.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilainya dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas mencakup 2 (dua) indikator yaitu: Prof. Dr. Riyadi Soeprapto

## 1. Peningkatan pemerataan akses pendidikan

Pada jenjang pendidikan formal, secara umum peningkatan pemerataan akses pendidikan masih menjadi masalah utama. Dalam hal ini anak-anak yang memerlukan perhatian khusus (*children with special needs*) juga belum sepenuhnya mendapat layanan pendidikan secara baik, termasuk dalam pendidikan dasar. Anak-anak yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Peningkatan Pemerataan akses pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (*planning*). Dalam membicarakan *planning* (*perencanaan*) pembangunan, maka setidaknya-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan, yaitu: Pendekatan secara administrasi negara (*public administration*) dan Pendekatan secara manajerial.

Berkaitan dengan persoalan peningkatan pemerataan akses pendidikan, maka pelaksanaan peningkatan pemerataan akses pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 yakni "...mencerdaskan kehidupan bangsa".

Diketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga jaminan pendidikan terhadap anak haruslah menjadi perhatian pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Nasib anak tergantung dari

berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan. Di Indonesia, UUD 1945 merupakan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (konstitusi) telah menjamin hak-hak dasar dari anak-anak yang kondisi sosialnya kurang beruntung. Seperti halnya Pasal 34, Pasal 38, akan tetapi jaminan Negara terhadap nasib anak-anak yang kurang beruntung tersebut kadang hanya sebatas retorika belaka. Pada realitasnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang terlantar dan masih banyak berbagai macam persoalan lainnya yang menyangkut anak yang belum mendapat perhatian penuh dari Pemerintah, khususnya permasalahan peningkatan pemerataan akses pendidikan bagi anak (masyarakat). Pemerataan akses pendidikan atau biasa disebut peningkatan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

## 2. Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu merupakan adanya program pendidikan gratis menuntun stakeholder dan semua pihak yang ada didalamnya agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat terutama dalam hal pemenuhan hak hidup untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan, pemerintah menerapkan sistem

peningkatan mutu demi mencapai sebuah kepuasan. Ini dalam bentuk monitoring atau peningkatan mutu dana pendidikan gratis ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Tim monitoring independen: perguruan tinggi, DPRD, tim independen khusus yang ditunjuk oleh pemerintah
2. Unsur masyarakat dari unsur dewan pendidikan, komite sekolah, serta organisasi masyarakat
3. Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis yang telah dirintis oleh pemerintah provinsi harus mendapat support yang kuat dari pemerintah kabupaten dan kota karena pemerintah kabupaten dan kota adalah ujung tombak di dalam menerapkan kebijakan pendidikan gratis ini. Dipihak yang lain, pendidikan gratis harus didorong secara bersamaan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan. Untuk mewujudkan tentu saja harus didukung dengan komitmen yang kuat, pendanaan yang besar dan dengan alokasi dan pemanfaatan yang tepat.

### **3. Konsep Good Governance**

Menurut Sumarto (2013), *Governance* dapat diartikan sebagai mekanisme, praktik dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Hal tersebut senada dengan definisi yang diberikan oleh *United Nations Developments Program* dalam Muhktar (2013:1049) yang menyatakan bahwa *Governance* adalah “pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan

negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial”.

Dalam hal *Good Governance*, Basuki dalam Muhktar (2013:104) mengartikan sebagai upaya merubah watak pemerintah yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Sejalan dengan pemikiran Robert Charlick dalam Pandji (2008:30) yang mengartikan *Good Governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Kemudian menurut Bank Dunia yang dikutip Mardiasmo dalam Hasyim (2006:1) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun Administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat.

Dari berbagai pengertian tentang *Good Governance* dapat disimpulkan bahwa suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang sah dan yang merujuk pada

kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan.

Lain halnya dengan Basuki dan Charlick, Tjiptoherijanto dalam Muhktar (2013:104) mendefinisikan *Good Governance* dari sudut pandang harapan aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, yang menyatakan bahwa *Good Governance* adalah tata kelola yang berupaya memenuhi harapan harapan pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keterlibatan maka pengambilan keputusan dalam pelayanan publik akan mendapatkan pertimbangan yang matang dan semua keinginan akan tercapai. Hal ini di dukung oleh yang diungkapkan oleh *Institute On Governance*, sebagai mana dikutip Nisjar (1997) dalam Pandji (2008:31), bahwa untuk menciptakan *Good Governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kerangka kerja tim (team work) anatar organisasi, departemen, dan wilayah.
- b. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat Negara yang bersangkutan.
- c. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggungjawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
- d. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan.
- e. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas

pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak.

Adapun unsur-unsur *Governance* menurut Efendi, 2005 meliputi; individual, organisasi, institusi dan kelompok sosial yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya tata pemerintahan yang efektif. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu :

a. Negara (*State*)

Pengertian negara/pemerintah (*State*) dalam hal ini secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional global.

b. Sektor swasta (*Private sector*)

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti; industri pengolahan (*manufactur*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga kegiatan sektor informal. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai peluang untuk perbaikan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan Masyarakat

c. Masyarakat madani (*Civil society*)

Masyarakat madani meliputi perseorangan dan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Masyarakat madani tidak hanya melakukan *check and balances* terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta tetapi juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur yang lain, seperti membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat, dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.

*Good Governance* memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor diatas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *Good Governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada dimasyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kunci utama memahami *Good Governance*, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Karena bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi (Hardjasoemantri, 2010:2)

- a. Partisipasi masyarakat semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Tegaknya supremasi hukum kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh
- d. Peduli lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada consensus tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur
- f. Kesetaraan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektifitas dan efisiensi proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

- h. Akuntabilitas para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
- i. Visi strategis para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

#### **4. Program Pendidikan Gratis**

Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana siswa. Dengan kata lain, komponen biaya untuk memenuhi kebijakan pendidikan gratis adalah berupa subsidi. Subsidi ini pun masih disertai sejumlah persyaratan, yaitu jika besaran dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih kecil dari biaya operasional sekolah, pemerintah kota dan siswa harus menutupi kekurangan dana tersebut. Begitu juga, bila dana yang diberikan jumlahnya sama atau lebih besar, orang tua siswa dibebaskan dari iuran pendidikan. Itu berarti bahwa sumber pembiayaan dari program pendidikan gratis ini dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua. Apalagi, masing-masing sekolah memiliki kebijakan berbeda menyangkut besaran iuran yang mesti ditanggung oleh sekolah dan orang tua.

Pemerintah seharusnya dengan sungguh–sungguh melaksanakan langkah strategisnya yang menitikberatkan pada 3 hal pokok yaitu: Pertama peningkatan

pemerataan dan akses pendidikan seluas-luasnya. Kedua, peningkatan mutu, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di jenjang pendidikan. Ketiga, peningkatan tata kelola, akuntabilitas tersebut dengan pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Hingga saat ini nampaknya kebijakan pendidikan nasional belum mengarah ke sana. Pemerintah juga seharusnya menjauhkan kebijakan pendidikan dari kepentingan pragmatis atau kepentingan politis Pendidikan Gratis. Program ini merupakan program unggulan yang ada di kabupaten Bone.

Karna pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah program pendidikan gratis di dinas pendidikan kabupaten Bone.

Adapun menurut Soeprapto Riyadi tentang Faktor pendukung dan penghambat pendidikan sebagai berikut:

Faktor pendukung pendidikan adalah yang pertama sarana dan prasaran kedua memiliki sumber daya biaya adapun faktor penghambanya adalah faktor komunikasi.

Minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan 9 tahun, ini berarti pendidikan minimal yang harus dimiliki adalah

tingkat SD dan SMP dimana anak berusia tujuh sampai lima belas tahun. Selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengalokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapaan belanja desa (APBD) untuk sektor pendidikan. Sangat jelas, bahwa undang-undang telah mengamanatkan kepada pemerintah, untuk memperhatikan pendidikan gratis di kabupaten Bone. Program pemerintah ini akan menjadi lebih mudah terealisasi tanpa ada pro dan kontra, kualitas tidak perlu diragukan, dan guru pun dengan suka cita mengajarkan semua hal yang baru kepada anak didik, karena mengajar merupakan separuh nafasnya. Apalagi jelas kondisi yang ditawarkan pemerintah jauh lebih baik dari sekolah.

Tidak ada alasan mendasar memang untuk menolak itikad baik pemerintah ini, hanya saja banyak yang perlu di tinjau ulang, Pemerintah meninjau hal teknis, dan para pendidik pun meninjau kedalam hati mereka, jangan sampai imbas dari pendidikan gratis ini membuat kualitas pendidikan semakin terpuruk, lalu mau jadi apa generasi kita yang akan datang yang menjadi masalah selama ini, mutu pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari harapan banyak pihak.

Dengan adanya program pendidikan gratis bisa menghasilkan sumber daya manusia yang handal, harus dihilangkan image dan tanggapan miring bahwa sesuatu yang bersifat gratis akan menghasilkan kualitas kendati menerapkan pendidikan gratis tetapi terkait peningkatan kualitas baik siswa maupun guru tetap dikedepankan. Guru juga sebagai ujung tombak dan penentu utama dalam bidang pendidikan masalah kualitas SDM tetap menjadi prioritas utama. Dalam peraturan daerah Kabupaten Bone tentang strategi pemerintah dalam

pengembangan kapasitas program pendidikan gratis di dinas pendidikan digambarkan:

1. Pendidikan gratis dilaksanakan pada sekolah Negeri maupun Swasta untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK negeri/swasta atau bentuk lain yang sederajat
2. Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia wajib belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu
3. Pendidikan gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, peserta didik, orang tua/wali peserta didik.

Adapun hak dan kewajiban pemerintah:

- a. Pemerintah berhak dan berwenang mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggara pendidikan
- b. Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak dan bermutu bagi setiap warga masyarakat
- c. Pemerintah wajib menjamin tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah guna terselenggaranya pendidikan gratis

Hak dan kewajiban orang tua:

- a. Orangtua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya
- b. Orangtua berkewajiban untuk menciptakan suasana di sekolah yang aman dan kondusif

Hak dan kewajiban peserta didik:

- a. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
- b. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kesempatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak dan kewajiban tenaga pendidik:

- a. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
- b. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan tenaga pendidik
- c. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

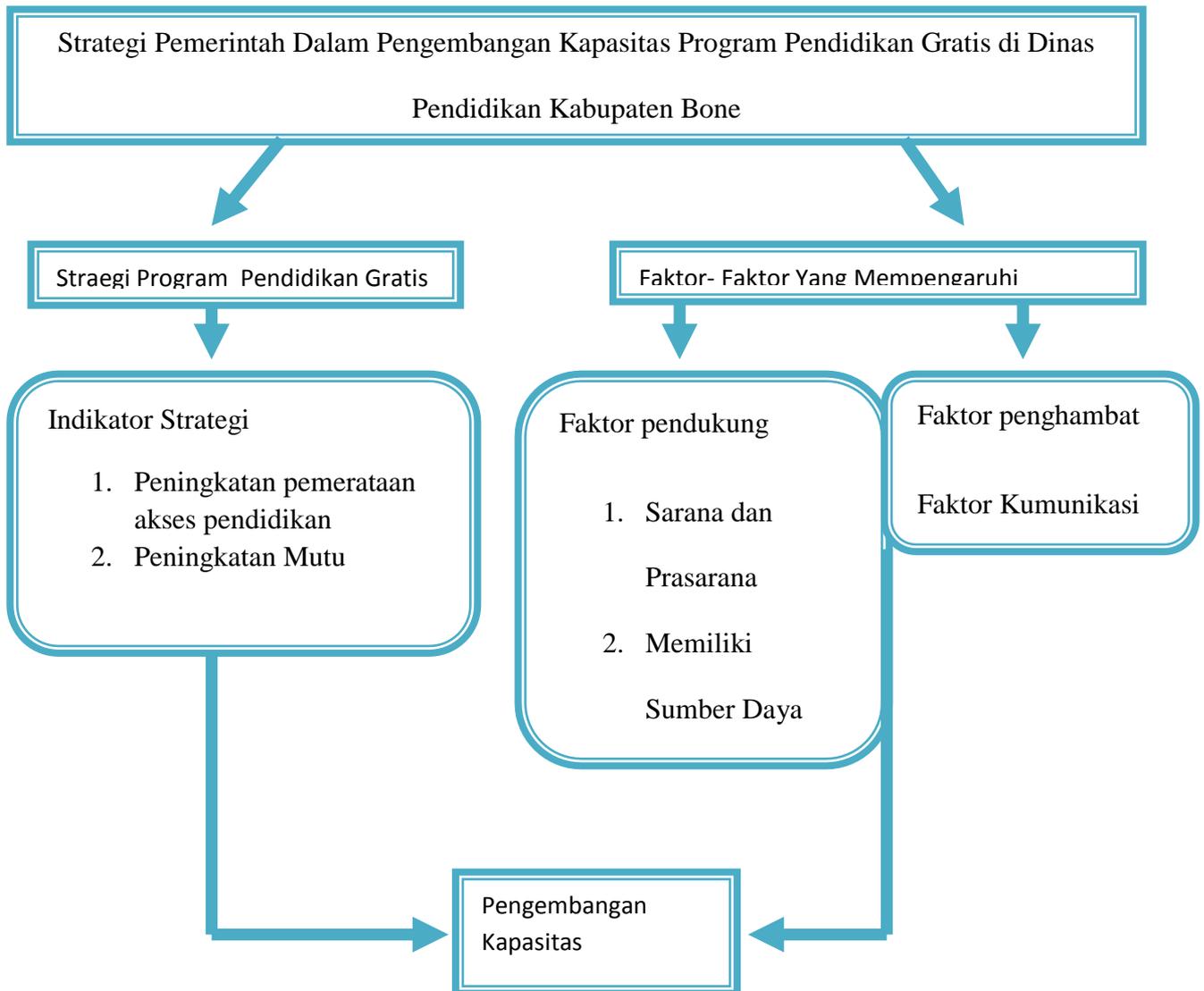
## **B. Kerangka Pikir**

Strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan banyak pihak yang berkepentingan. Strategi dapat dijadikan sebagai 4P, yaitu strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan dan strategi sebagai pola kegiatan. Sebagai perspektif, dimana strategi dalam membentuk misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi organisasi. Sebagai pola kegiatan, dimana

dalam strategi dibentuk suatu pola yaitu umpan balik dan penyesuaian. Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai strategi, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi itu adalah rencana tentang serangkaian maneuver yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan.

Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana siswa tidak lagi dibebankan dengan biaya uang masuk sekolah. Baju seragam, uang transportasi dan buku penunjang utama masih tanggungan orang tua siswa. Dan untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung oleh pemerintah. Pendidikan merupakan suatu wahana di mana kita dapat mengetahui berbagai ilmu pengetahuan dan tata cara hidup berkualitas, sehingga kita dapat tumbuh menjadi manusia yang dapat berfikir untuk jangka panjang dan cerdas membangun bangsa. Oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang memungkinkannya memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi dan fenomena yang terjadi di masyarakatnya.

### Bagan Kerangka Pikir



### C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

#### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas maka dapat dikemukakan defenisi fokus sebagai berikut:

##### **1. Peningkatan pemerataan akses pendidikan**

Peningkatan Pemerataan akses pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (planning). Dalam membicarakan planning (perencanaan) pembangunan, maka setidaknya-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan, yaitu: Pendekatan secara administrasi negara dan Pendekatan secara manajerial. Berkaitan dengan persoalan peningkatan pemerataan akses pendidikan, maka pelaksanaan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 yakni "...mencerdaskan kehidupan bangsa".

##### **2. Peningkatan Mutu**

Peningkatan mutu merupakan adanya program pendidikan gratis menuntun stakeholder dan semua pihak yang ada didalamnya agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat terutama dalam hal pemenuhan hak hidup untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan, pemerintah menerapkan sistem peningkatan mutu demi mencapai sebuah kepuasan.

Faktor pendukung:

1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti : halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.

2. Memiliki sumber daya biaya

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Faktor penghambat:

1. Faktor komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang lain. dengan adanya komunikasi maka terjadilah hubungan sosial. karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, maka terjadilah interaksi timbal balik. Komunikasi dalam pendidikan merupakan unsur yang sangat penting kedudukannya, bahkan ia sangat besar perannya dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang bersangkutan. Orang sering berkata bahwa tinggi rendahnya suatu pencapaian mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor komunikasi ini, khususnya komunikasi pendidikan.

Pengembangan suatu strategi dikatakan sebagai pengembangan jika secara sengaja organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas, dan sumber daya yang pada ujungnya akan melahirkan postur organisasi baru yang berbeda di masa depan memiliki faktor pendukung dan penghambat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal selama 2 bulan. Berdasarkan judul penelitian “Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone” Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yang dimulai pada tanggal 26 Februari sampai dengan 26 April 2018. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui pengumpulan data. Dan metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus untuk mendapatkan metode yang mendalam penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan di analisa menjadi suatu teori. Studi kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapatkan dari fenomena yang diteliti tersebut.

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Moeloeng 2011: 11). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Pendekatan penelitian kualitatif menurut Bogelan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sejalan dengan itu, Krik dan Miller mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Penelitian ini bertipe fenomenologi yaitu menjelaskan dan menggambarkan pengalaman para informan tentang implementasi pendidikan gratis di dinas pendidikan kabupaten Bone.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

#### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan (observasi) pada informan.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

### **D. Informan Penelitian**

Mengingat peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka dipilihlah informan sebagai sumber data primer penelitian. Untuk penelitian kualitatif lebih

cocok menggunakan sampling Purposive (Sugiyono, 2012:85). Sampling Purposive yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti permasalahan penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah informan penelitian ini.

**Tabel Informan**

No	Nama	Inisial	Jabatan	Informan
1	Drs. H. Rosalim Hab, S.Sos, M.Si	RH	Kepala Dinas	1 orang
2	Drs. Nursalam, M.Pd	NL	Sekretaris	1 orang
3	Masjaya, S.Pd	MJ	Kepala Sekolah	1 orang
4	Herianto, S.Pd	HR	Ketua Komite	1 orang
5	Acha	Aa	Masyarakat / Orang Tua Siswa	1 orang
			Jumlah	5 Orang

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

##### a) Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.

##### b) Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan Program pendidikan Gratisdi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

c) Dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dan daftar pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, dan karya tulis ilmiah.

**F. Teknik Analisis Data**

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

- a). Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.
- b). Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
- c). Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **G. Keabsahan Data**

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu :

##### a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

##### b). Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-

beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c). Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Keadaan Umum Peta Kabupaten Bone**

Keadaan umum di mulai dengan peta Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan yang menggambarkan letak Kabupaten Bone dan kecamatan serta batasnya dalam kaitannya dengan lingkungan sekelilingnya. Kemudian di lanjutkan dengan keadaan non pendidikan yang meliputi tiga (3) faktor, 1) Administrasi pemerintahan daerah, 2) Demografi, 3) Geografi,. Terakhir dijelaskan tentang keadaan pendidikan yang di mulai dari tingkat TK sampai ke tingkat SMA.

Dapat dikemukakan bahwa batas wilayah kabupaten Bone adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

##### **2. Non Pendidikan**

Keadaan non pendidikan di masukkan dalam profil pendidikan karna selama ini terdapat kesan bahwa faktor lingkungan sering kurang diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan sehingga timbul berbagai masalah, antara lain 1) Infut, pendidikan kurang dikelola secara optimal dan 2) Output pendidikan di anggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lingkungan

sehingga belum mampu menunjang pembangunan nasional. Untuk itu masalah non pendidikan perlu dikaitkan dengan pendidikan yang ada.

**a. Administrasi Pemerintahan Daerah**

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di kabupaten tidaklah berdiri sendiri melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di kabupaten Bone harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari pemerintah daerah kabupaten Bone untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 27 kecamatan dan terbagi ke dalam 372 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya 4.559 km<sup>2</sup> (Tabel 1.2).

**Tabel 1.2**  
**Administrasi Pemerinahan Kabupaten Bone**  
**Tahun 2017**

No	Variabel	Jumlah
1	Kabupaten	1 buah
2	Kecamatan	27 buah
3	Desa/Kelurahan	328 + 44 = 372 buah
4	Desa terpencil	76 buah
5	Luas wilayah	4.559 km <sup>2</sup>

Dari jumlah kelurahan/desa tersebut, diantaranya 76 buah atau 20,43 persen merupakan desa terpencil.

#### **b. Demografi**

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan gratis, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu aspek-aspek kependudukan dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu di pertimbangkan dalam pengembangan kapasitas pendidikan

#### **c. Geografi**

Faktor geografi dimaksud mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan, pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersedianya SDA merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung, keadaan geografi yang tidak menguntungkan karena keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar

dan erpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.

Keadaan geografi di wilayah kabupaten Bone, perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan enam faktor, yaitu: 1) rencana penentuan lokasi sekolah; 2) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; 3) rencana supervisi sekolah dan pengendalian; 4) rencana penempatan guru ; 5) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku; dan 6) peralatan pendidikan lainnya.

SDA baik yang terkandung di daratan, di sungai, maupun di laut (jika ada) merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal itu berarti bahwa pengelolaan SDA secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten Bone dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan kapasitas pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Di Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan terdapat berbagai SDA, di antaranya yang menjadi andalan adalah 1) batu bara, 2) batu gamping, 3) pasir kuarsa, 4) tembaga, 5) emas dan lain-lain.

**Tabel 1.5**  
**Keadaan Geografi**  
**Tahun 2017**

No	Variabel	Jumlah
1	Sumber daya alam yang menonjol	Batu bara, batu gamping, pasir kuarsa, tembaga emas dll.
2	Keadaan alam	
	a. Musim kemarau (bulan)	6 bulan (April-September)
	b. Musim penghujan (bulan)	6 bulan (oktober- Maret)
3	Curah hujan	
	a. Tertinggi (mm <sup>2</sup> )	3.000 mm <sup>2</sup>
	b. Terendah (mm <sup>2</sup> )	1.750 mm <sup>2</sup>

Sumber : Kabupaten Bone dalam angka 2017

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi pendidikan.

Musim kemarau di Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan biasanya pada bulan April-September, sedangkan musim hujan terjadi bulan Oktober-Maret, dengan curah hujan rata-rata adalah 2.500 mm<sup>2</sup>, serta curah hujan tertinggi dan terendah masing-masing adalah 3.000 mm<sup>2</sup> dan 1.750 mm<sup>2</sup>.

Dengan dilaksanakannya pembangunan program pendidikan gratis ini dan pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut. Secara rinci pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan TK/RA, tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan tingkat SMA/MA/SMK.

### **3. Pendidikan**

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan cukup menggembirakan pelaksanaan program pendidikan dan pembangunan di Kabupaten Bone telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pendidikan gratis ini dan pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat

menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk tidak mampu. Secara rinci program pendidikan gratis dan pembangunan di setiap jenjang pendidikan, oleh karena itu akan dijelaskan tentang keadaan TK/RA, tingkat SD/MI, tingkat SMP/MTs, dan tingkat Dma/MA/SMK.

### **1. Tingkat SD (SD dan MI)**

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2017/2018, jumlah SD dan MI sebanyak 758 buah, dengan rincian negeri sebesar 672 buah dan swasta sebesar 86 buah. Hal ini disebabkan karna banyaknya SD Negeri yang dibangun melalui program Pendidikan gratis. Jumlah siswa baru tingkat 1 SD dan MI sebesar 13.668 orang dengan rincian dari TK/RA sebesar 10.225 orang dan dari rumah tangga sebesar 3.443 orang. Jumlah siswa SD dan MI seluruhnya sebesar 88.236 orang, dengan rincian negeri sebesar 79.647 orang dan swasta sebesar 8.589 orang. Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah laki-laki sebesar 46.058 orang dan perempuan sebesar 42.178 orang. Bila dirinci menurut usia, maka usia <7 tahun sebesar 1.726 orang, 7-12 tahun sebesar 86.261 orang dan <12 tahun sebesar 249 orang. Jumlah kelas SD dan MI sebesar 4.889 ruang dan rata-rata UASBN SD dan MI adalah 74,56, sedangkan lulusan sebesar 14.915 orang. Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 6.792 orang, di antaranya yaitu sebanyak 739 orang (10,88%) adalah berijazah di bawah S1 dan sebanyak 6.053 orang (89,12%) adalah S1 ke atas. Guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik yaitu sebanyak 4.209 orang dan yang belum sebanyak 2.583 orang. Sedangkan kepala sekolah yang bersertifikat sebesar 740 orang dan belum bersertifikat sebesar 18 orang. Untuk menampung sejumlah siswa SD dan MI tersebut, tersedia ruang

kelas sebanyak 5.021 buah, dengan rincian 3.265 ruang memiliki kondisi baik, 1.453 ruang, kondisi rusak ringan, dan 303 ruang dalam kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 4.889 ruang sehingga tidak terdapat shift. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 298 ruang, lapangan olahraga sebesar 469 buah, ruang UKS sebesar 460 buah, toilet sebesar 758 ruang, air bersih sebesar 758 buah dan listrik sebesar 51 unit.

**Tabel 1.7**  
**Data Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah**  
**Tahun 2017**

No	Komponen	SD	MI	SD+MI
1	2	3	4	5
1.	Sekolah			
	a. Negeri	665	7	672
	b. Swasta	5	81	86
	c. Akreditasi A	59	2	61
	d. Akreditasi B	528	33	561
	e. Akreditasi C	81	30	111
2.	Siswa			
	a. Negeri	78.436	1.211	79.647
	b. Swasta	691	7.898	8.589
	c. Laki-laki	41.210	4.848	46.058
	d. Perempuan	37.917	4.261	42.178
	e. <7 tahun	1.469	257	1.726
	f. <7-12 tahun	77.430	8.831	86.261
	g. >12 tahun	228	21	249
3.	Kelas	4.334	555	4.889
4.	Rata-rata UASBN	75,94	73,18	74,56
5.	Lulusan	13.516	1.399	14.915
6.	Fasilitas			
	a. Perpustakaan	276	22	298
	b. Lapangan olahraga	435	34	469
	c. UKS	441	19	460
	d. Toilet	670	88	758
	e. Air bersih	670	88	758
	f. Listrik	535	36	571

Bila dilihat SD dan MI dapat digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI, hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SD sebesar 670 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 97.127 orang dan ruang kelas sebesar 4.420 buah dan ditangani oleh guru sebanyak 5.764 orang. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 276 buah, lapangan olahraga sebesar 435 buah, ruang UKS sebesar 441 buah, toilet sebesar 670 buah, air bersih sebesar 670 dan listrik sebesar 535 unit.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika di bandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah Madrasah swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh Yayasan Swasta, sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis.

## **2. Tingkat SMP ( SMP dan MTs)**

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2017, jumlah SMP dan MTs sebanyak 211 buah, dengan rincian negeri sebanyak 117 buah dan swasta sebanyak 94 buah. Dilihat dari terakreditasi sekolah sebanyak 18 buah telah terakreditasi A, 68 buah terakreditasi B, 54 buah terakreditasi C dan 71 buah belum terakreditasi. Jumlah siswa baru tingkat 1 SMP dan MTs sebesar 14.121 orang, dengan rincian laki-laki sebesar 7.030 orang dari perempuan sebesar 7.091 orang. Jumlah siswa SMP dan MTs seluruhnya sebesar 40.005 orang, dengan rincian negeri sebesar 31.000 orang dan swasta sebesar 19.813 orang dan perempuan sebesar 20.912 orang. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa <13 tahun sebesar 1.136 orang (2,84 persen), 13-15 tahun sebesar 38.478 orang

(96,18 persen) dan >15 tahun sebesar 391 orang (0,98 %). Jumlah kelas sebesar 1.612 buah, rata-rata UN SMP dan MTs adalah 77,98 dan lulusan SMP dan MTs sebesar 12.584 orang. Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 3.439 orang, diantaranya yaitu sebanyak 3.391 orang (98,60%) memiliki kualifikasi S1 ke atas, dan sebanyak 48 orang (1,40%) memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 1.821 orang dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 1.618 orang. Sedangkan kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 188 orang dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 23 orang.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 1.568 buah, dengan rincian 1.258 buah memiliki kondisi baik, 251 buah dengan kondisi rusak ringan, dan 59 buah dalam kondisi rusak berat, dengan jumlah kelas sebesar 1.612 ruang, sehingga terdapat shift sebesar 44 ruang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 121 ruang, lapangan olahraga sebesar 154 buah, UKS sebesar 125 ruang, laboratorium sebesar 82 ruang, tempat ibadah sebesar 102 ruang, toilet sebesar 211 buah, air bersih sebesar 211 buah, dan listrik sebesar 152 unit.

Bila dilihat SMP dan MTs dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs, jumlah SMP sebesar 122 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 28.285 orang dan ruang kelas sebesar 1.121 buah dan ditangani oleh guru sebanyak 1.999 orang. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 93 ruang, lapangan olahraga sebesar 108 buah, UKS sebesar

78 ruang, laboratorium sebesar 71 ruang, tempat ibadah sebesar 59 ruang, toilet sebesar 122 buah, air bersih sebesar 122 buah dan listrik sebesar 108 unit.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMP jika dibandingkan dengan MTs. Sebaliknya jumlah madrasah swasta lebih banyak di MTs jika dibandingkan dengan SMP. Hal ini disebabkan karena SMP lebih banyak dibangun dengan adanya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

**Tabel 1.8**  
**Data Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah**  
**Tahun 2017**

No	Komponen	SMP	MTs	SMP+MTs
1	2	3	4	5
1.	Sekolah			
	a. Negeri	113	4	117
	b. Swasta	9	85	94
	c. Akreditasi A	17	1	18
	d. Akreditasi B	54	14	68
	e. Akreditasi C	17	37	54
	f. Belum akreditasi	34	37	71
2.	Siswa			
	a. Negeri	27.814	3.186	31.000
	b. Swasta	771	8.234	9.005
	c. Laki-laki	14.108	5.705	19.813
	d. Perempuan	14.477	5.715	20.192
	e. <12 tahun	538	600	1.136
	f. 13-15 tahun	27.857	10.621	38.478
	g. >15 tahun	192	199	391
3.	Kelas	1.125	487	1.612
4.	Rata-rata UN	77,88	78,07	77,98
5.	Lulusan	9.174	3.410	12.584
6.	Kepala sekolah			
	a. Bersertifikat	122	66	188
	b. Belum bersertifikat	-	23	23
7.	fasilitas			
	a. Perpustakaan	93	28	121
	b. Lapangan olahraga	108	46	154
	c. UKS	78	47	125
	d. Laboratorium	71	11	82
	e. Tempat ibadah	59	43	102
	f. Toilet	122	89	211

### 3. Tingkat SM (SMA, MA dan SMK)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2017, jumlah SM dan MA sebanyak 102 buah, dengan rincian negeri sebanyak 43 buah dan swasta sebanyak 59 buah. Dilihat dari terakreditasi sekolah sebanyak 15 buah telah terakreditasi A, 21 buah terakreditasi B, 22 buah terakreditasi C dan 44 buah belum terakreditasi.

**Tabel 1.9**

**Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2017**

No	Komponen	SMA	MA	SMK	SM+MA
1	2	3	4	5	6
1.	Sekolah				
	a. Negeri	30	4	9	43
	b. Swasta	8	36	15	59
	c. Akreditasi A	11	2	2	15
	d. Akreditasi B	12	5	4	21
	e. Akreditasi C	7	11	4	22
	f. Belum akreditasi	8	22	14	44
2.	Siswa				
	a. Negeri	17.888	2.708	4.662	25.258
	b. Swasta	635	3.548	1.063	5.246
	c. Laki-laki	8.605	2.967	3.224	14.796
	d. Perempuan	9.918	3.289	2.501	15.708
	e. <16 tahun	1.204	310	446	1.960
	f. 16-18 tahun	17.020	5.837	5.234	28.091
	g. >18 tahun	299	109	45	453
3.	Kelas	588	230	200	1.018
4.	Rata-rata UN	67.83	64.86	63.38	65.36
5.	Lulusan	5.649	1.714	1.550	8.913
6.	Kepala sekolah				
	a. Bersertifikasi	34	30	13	77
	b. Belum bersertifikasi	4	10	11	25
7.	Fasilitas				
	a. Perpustakaan	33	15	9	57
	b. Lapangan olahraga	31	18	10	59
	c. Tempat ibadah	31	28	10	69
	d. Toilet/ WC	38	40	24	102
	e. listrik	38	25	24	87

Jumlah siswa baru tingkat SM dan Ma sebesar 10.768 orang, dengan rincian laki-laki sebesar 5.429 orang dan perempuan sebesar 5.339 orang. Jumlah siswa SM dan Ma seluruhnya sebesar 30.504 orang dengan rincian negeri sebesar 25.258 orang dan swasta sebesar 5.246 orang. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar 14.796 orang dan perempuan sebesar 15.708 orang. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa <16 tahun sebesar 1.960 orang (6,43%), 16-18 tahun sebesar 28.091 (92,09%), dan >18 tahun sebesar 453 orang, (1,48%). Jumlah kelas sebesar 1.018 ruang, rata-rata UN SM dan MA adalah 65,36 dan lulusan SM dan MA sebesar 8.913 orang. Guru yang mengajar di SM dan MA sebanyak 2.618 orang diantaranya yaitu sebanyak 2.608 orang (99,62%) memiliki kualifikasi S1 ke atas dan 10 orang (0,38%) memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 1.173 orang dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 1.445 orang. Sedangkan kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat sebanyak 77 orang dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 25 orang.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 981 buah, dengan rincian 809 memiliki kondisi baik, 143 ruang dengan kondisi rusak ringan, dan 29 ruang dalam kondisi rusak berat, dengan jumlah kelas sebesar 1.018 ruang, sehingga terdapat shift sebesar 37 ruang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SM dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 57 ruang, lapangan olahraga sebesar 59 buah ruang UKS sebesar 54 buah laboratorium sebesar 122 ruang tempat ibadah sebesar 69 ruang, toilet sebesar 102 buah air bersih sebesar 102 buah dan listrik sebanyak 87 unit.

Bila dilihat SMA, SMK dan MA dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMA/MA lebih besar dibandingkan dengan SMK. Jumlah SMA sebesar 38 buah dengan jumlah siswa sebanyak 18.523 orang dan ruang kelas sebesar 564 buah serta ditangani oleh guru sebanyak 1.193 orang. Selain itu terdapat pula perpustakaan sebesar 33 ruang lapangan olahraga sebesar 31 buah ruang UKS sebesar 30 buah laboratorium sebesar 81 ruang. Ruang keterampilan sebesar 10 buah ruang BP sebesar 26 buah ruang serbaguna sebesar 6 buah tempat ibadah sebesar 31 buah toilet sebesar 38 buah air bersih sebesar 38 buah dan listrik sebesar 38 unit. Bila dilihat menurut status sekolah jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMA jika dibandingkan dengan SMK dan MA. Sebaliknya jumlah sekolah swasta lebih banyak di MA jika dibandingkan dengan SMA dan SMK.

#### **4. Pendidikan Non Formal**

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2017 jumlah peserta didik PAUD sebesar 20.090 orang dengan rincian kelompok bermain sebesar 125 orang, taman penitipan anak sebesar 5 orang, pos PAUD sebesar 0 orang, satuan PAUD sejenis sebesar 430 orang, taman pendidikan Al-Qur'an sebesar 18.983 orang. Dari keempat jenis PAUD yang terbesar adalah taman pendidikan Al-Qur'an dan terkecil adalah taman penitipan anak. Sedangkan peserta didik laki-laki sebesar juga pada taman pendidikan Al-Qur'an dan terkecil pada taman penitipan anak. Adapun peserta didik kesetaraan yaitu sebesar 418 orang yang terdiri dari paket A sebesar 98 orang, paket B sebesar 180 orang dan paket C sebesar 140 orang. Sedangkan peserta didik laki-laki terbesar pada paket B dan terkecil pada paket A. Penduduk

buta huruf (usia 15-24) tahun sebesar 546 orang dengan rincian laki-laki sebesar 258 orang (47,25%) dan perempuan sebesar 228 orang (52,75%).

**Tabel 1.10**

**Data Peserta Didik PAUD, Kesetaraan, dan penduduk Buta Huruf Tahun 2017**

No	Komponen	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1.	PAUD					
	a. Kelompok bermain	152	52,96	135	47,04	287
	b. TPA	5	50,00	5	50,00	10
	c. SPS	430	53,09	380	46,91	810
	d. TPQ	8.555	45,07	10.428	54,93	18.983
2.	Kesetaraan					
	a. Paket A	47	47,96	51	52,04	98
	b. Paket B	74	41,11	106	58,89	180
	c. Paket C	59	42,14	81	57,86	140
3.	Penduduk buta huruf 15-24 tahun	258	47,25	288	52,75	546

Sumber 2017

**4. Visi dan Misi**

**Visi:**

Mewujudkan Peserta didik yang unggul dalam presatasi, beriman, bertakwa, berakhlak, cerdas, terampil, mandiri, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

**Misi:**

- Mengupayakan terwujudnya dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas
- Meningkatkan mutu pendidikan agama, akhlak, budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan ilmu-ilmu dasar penunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

## **5. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, daerah, maupun daerah di dalam bidang pendidikan. Tugas pokoknya adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan sesuai wilayah kerja, agar berjalan dengan lancar. Sedangkan fungsi dari dinas pendidikan, yang pertama adalah sebagai perumus kebijakan teknik di bidang pendidikan jadi semua yang berhubungan dengan kebijakanteknik pendidikan akan diselenggarakan oleh dinas pendidikan. Fungsi kedua adalah sebagai penyelenggara umum di bidang pendidikan, selain itu dinas pendidikan juga berfungsi dalam mengatur penempatan guru yang bertugas, mulai dari mengangkat kepala sekolah maupun untuk pengangkatan pegawai Negeri sipil. Dinas pendidikan kabupaten Bone dikoordinasikan oleh asisten tata pemerintahan yang membawahi Sekretariat, sub bagian umum, sub bagian program, sub bagian keuangan, bidang SD/MI, bidang SMP/MTs, bidang paud dan diknas dan bidang ketenagaan.

Adapun mengenai bagan struktur organisasi dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu:

Uraian tugas dari masing-masing bagian yang ada di struktur organisasi akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Sekretaris bertugas mengatur dokumen atau surat menyurat mengenai kebijakan, serta meneruskan edaran dari kementerian pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada di bawah wilayahnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menyelenggarakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut; 1) penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, 2) penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, 3) pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, dan 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

3. Sub Bagian Program

Menyelenggarakan data dan informasi sebagai berikut; 1) penyusunan rencana dan program data dan informasi, 2) pelaksanaan kebijakan operasional lingkup program data dan informasi, 3) penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program data dan informasi, dan 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program data dan informasi.

4. Sub Bagian Keuangan

Menyelenggarakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut; 1) penyusunan rencana dan program kerja lingkup keuangan, 2) penyiapan bahan kebijakan

operasional lingkup keuangan, 3) pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan, dan 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan.

5. Bidang SD/MI

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan sebagian tugas dinas yang meliputi pembinaan kesiswaan manajemen dan kelembagaan sarana dan prasarana di TK dan SD di wilayah kerjanya.

6. Bidang SMP/MTs

Bertugas mengatur administrasi dan sebagainya di SMP dan SMA di wilayah kerjanya.

7. Bidang Paud dan Hikmas

Yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan seksi kemitraan dan kelembagaan

8. Bidang Ketenagaan

Mempunyai tugas menyusun kegiatan prosedur operasional dalam pelaksanaan kegiatan ketenaga kerjaan.

**B. Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.**

Masalah program pendidikan gratis menjadi sasaran utama dalam meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan yang berkualitas sehingga program pendidikan gratis khususnya di dinas pendidikan kabupaten Bone sebagai pusat aktivitas dengan pelayanan yang di berikan dalam bentuk mendidik

anak usia dini sampai dewasa. Oleh karena itu dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan gratis tersebut dalam bentuk pelayanan pendidikan yang berkualitas sehingga perlu ada strategi. Di mana strategi berkaitan dengan suatu cara untuk mencapai tujuan.

Suatu organisasi dalam suatu penyusunan strategi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi yang sesuai dengan visi dan misi dari setiap organisasi. Suatu organisasi yang baik adalah memiliki tujuan yang jelas terdiri dari visi dan misi yang telah disepakati oleh instansi yang terkait, untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuk cara untuk mencapainya.

Strategi program pendidikan gratis dalam pelayanan pendidikan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan pelayanan pendidikan tersebut guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Demikian halnya dengan dinas pendidikan sebagai salah satu instansi yang ada di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten Bone harus mempersiapkan diri terutama mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Oleh karena itulah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tentram perlu menuntut ilmu.

Dinas pendidikan Kabupaten Bone yang bertugas untuk membina khususnya dibidang pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana. Oleh karena itulah untuk menunjang pendidikan harus meningkatkan pelayanan terutama dibidang pendidikan untuk menanggulangi adanya pengangguran maka diperlukan adanya pendidikan gratis.

Dari penjelasan diatas, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ketua Komite Sekolah menyatakan bahwa:

“... Dana pendidikan gratis yang diperoleh sekolah sesuai dengan RKA yang dibuat oleh tiap sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah yang terkait, kemudian dana tersebut nantinya akan di kelolah oleh pihak sekolah dan pengeluaran dana pendidikan gratis ini di lakukan pengawasan sehingga memberi kewaspadaan terhadap bagian yang ditunjuk yaitu bagian pengelolaan keuangan”(Wawancara dengan HR, 28 Februari 2018).

Dari hasil wawancara menggambarkan bahwa ketua komite setiap sekolah memperoleh dana pendidikan gratis sesuai dengan rencana kerja anggaran yang di susun oleh pihak sekolah yang akan mendapatkan dana pendidikan sesuai kebutuhan sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan dan akses pendidikan, peningkatan mutu dan peningkatan sumber daya manusia. Di lain pihak peran yang dijalankan komite setiap sekolah adalah pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan serta berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan di satuan pendidikan dan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

Adapun hasil wawancara bersama kepala dinas pendidikan kabupaten Bone tentang pelaksanaan program pendidikan gratis di setiap sekolah mengatakan bahwa:

“Setiap tahunnya, pemerintah daerah kabupaten Bone menururkan rata-rata 25% total APBD kabupaten Bone untuk membangun infrastruktur pendidikan serta peningkatan sumber daya manusia di setiap daerah masing-masing. Bukan itu saja, program pelatihan peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi seluruh guru juga dianggarkan untuk mendongkrak kualitas pendidikan. Selain itu pemberian beasiswa mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi juga dialokasikan setiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan apresiasi untuk menumbuhkan kualitas sumber daya yang siap pakai. Mengenai program pendidikan gratis telah dilaksanakan sejak tahun 2009 lalu yang diterapkan mulai dari tingkat SD hingga SMA. Selain itu pemerintah daerah melaksanakan biaya pendidikan gratis sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah setempat” (Wawancara dengan RH, 28 Februari 2018).

Dari hasil wawancara dengan kepala dinas pendidikan kabupaten Bone, bahwa pelaksanaan pendidikan gratis ini ditujukan kepada masyarakat agar tidak lagi memiliki alasan untuk tidak sekolah karena alasan biaya selain itu program ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Biaya yang digunakan pelaksanaan pendidikan gratis ini memiliki cakupan yang luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk ruang maupun barang dan jasa. Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai prasyarat masyarakat modern, dalam mencapai tujuan-tujuan sosial yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan.

Dalam pelaksanaan program pendidikan gratis pemerintah kabupaten Bone berharap agar provinsi Sulawesi Selatan dapat menjalankan kerja sama dengan baik.

Adapun hasil wawancara dengan sekretaris di kantor dinas pendidikan kabupaten Bone, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pendidikan gratis di setiap sekolah mulai SD hingga SMA sangat membantu masyarakat utamanya masyarakat ekonomi bawah, dalam hal ekstrakurikuler khusus bidang olahraga siswa masih dikenakan biaya kelengkapan berupa pembayaran pakaian seragam olahraga, namun yang mesti diperhatikan dari pelaksanaan program ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan gratis ini tidak berarti seluruh kegiatan pendidikan tidak dibayar” (Wawancara dengan NL, 05 Maret 2018)

Hasil wawancara dengan komite sekolah yang menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan gratis sangat membantu pihak sekolah maupun masyarakat, namun masyarakat masih banyak beranggapan bahwa dana pendidikan gratis seluruhnya ditanggung oleh pemerintah khusus dalam bidang olahraga misalnya, pembayaran pakaian seragam olahraga siswa masih dikenakan pembayaran sehingga banyak masyarakat menginginkan agar kelengkapan siswa harus menjadi prioritas utama. Hal ini komite sekolah memiliki fungsi untuk mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Hal senada pula yang dipaparkan Kepala sekolah Kabupaten Bone dalam wawancara yang kami lakukan mengaakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pendidikan gratis yang ada di kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik karena adanya keterbukaan dalam pelaksanaan program tersebut, dan adanya strategi dalam pengembangan kapasitas serta team work. Oleh karena itu tentulah harus dipersiapkan sedemikian cara menyampaikan dan menginformasikan hal tersebut kepada masarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terjangkau. Maka dari itu pihak sekolah sangat berharap agar pemerintah setempat lebih memperhatikan nasib pendidikan masyarakat sebab keterlibatan seluruh masyarakat dalam suatu kebijakan dari pemerintah amat dituntut. Apalagi jika kebijakan yang disampaikan pemerintah ditujukan bagi mayoritas masyarakat yang memang tingkat ekonominya lemah, maka dari itu seluruh stakeholder. Pendidikan gratis sangat membantu pihak sekolah maupun seluruh masyarakat di Kabupaten Bone” (Wawancara dengan IY, 12 Maret 2018).

Hal senada pula yang dipaparkan orang tua siswa Kabupaten Bone dalam wawancara yang kami lakukan mengaakan bahwa:

“Sistem suatu kebijakan harus di tingkatkan khususnya program pendidikan gratis agar pengelolaan dan pengalokasian anggarannnya tepat sasaran. Menurut

beliau sistem program pendidikan gratis ini sudah baik dan membantu banyak masyarakat supaya mengakomodir aspirasi orang tua siswa” (Wawancara dengan RR, 12 Maret 2018).

### **1. Peningkatan pemerataan dan akses pendidikan**

Peningkatan Pemerataan akses pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (planning). Dalam membicarakan planning (perencanaan) pembangunan, maka setidaknya-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan. Semua anak didik tanpa terkecuali harus mengenggam pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi, baik mereka yang berada di daratan, penguasaan maupun mereka yang selama ini bermukim di kepulauan. urgenya adalah mereka yang masuk usia sekolah tidak ada lagi yang tidak tahu menulis dan membaca. Karena dengan membaca pada hakikatnya langkah esensial untuk menyalurkan fitrah manusia, sekalipun manusia tidak diperintahkan untuk membaca sendiri dengan sendirinya memiliki bawaan bisa membaca, karena sesuatu yang melekat pada diri manusia adalah selalu ingin tahu terlebih dahulu telah disiapkan sarana yang mendukung terlaksananya sebuah perintah.

Dalam wawancara dengan kepala dinas pendidikan Kabupaten Bone dalam strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pendidikan gratis di kantor Dinas Pendidikan sudah berjalan dengan baik dengan hal ini monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis, hanya saja masih banyak masyarakat beranggapan biaya pendidikan gratis sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah” (Wawancara dengan RH, 05 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, dalam hal ini sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota dan dalam mengawal pelaksanaan program pendidikan gratis.

Sejalan dengan hal diatas berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah Kabupaten Bone dalam hal ini mengatakan bahwa:

“Program ini membuat pihak sekolah cukup bertanggung jawab dan terbuka dalam pelaksanaan program pendidikan gratis sebab adanya strategi dan pengembangan kapasitas serta team work yang saling bekerja sama dalam menjalankan program pendidikan gratis, utamanya terhadap pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan sebab pendidikan merupakan aset untuk kedepannya dan dalam hal ini pendidikan memiliki peran penting yang cukup besar dalam lingkungan masyarakat”(Wawancara dengan MN, 12 Maret 2018).

Sejalan dengan itu adapun hasil wawancara dengan masyarakat atau orang tua siswa Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pendidikan gratis khusus di Kabupaten Bone pada tingkat lanjutan pertama masih terdapat siswa yang dibebani pembayaran fotocopy, buku. Hal ini membuat kami masih kurang setuju dengan hal tersebut” (Wawancara dengan NH 16 Maret 2018).

Dalam wawancara dengan sekretaris pendidikan Kabupaten Bone dalam strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan menyatakan bahwa:

“Mengenai program pendidikan gratis yang di terapkan di sekolah-sekolah dengan berbagai hal dapat meningkatkan pendidikan atau meningkatkan proses belajar mengajar pada siswa, dan saya selaku sekretaris sangat bersyukur karna diterapkannya program pendidikan gratis di sekolah-sekolah, karna masih banyak orang tua siswa yang kurang mampu untuk membiayai anaknya untuk sekolah” (Wawancara. Dengan NL 16 Maret 2018).

Dari hasil wawancara dengan ketua komite pendidikan kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Bahwa anggaran untuk Penyelenggaraan pendidikan gratis untuk rakyat sangat membantu masyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu, meringankan beban biaya dan memberi kesempatan yang sama untuk menikmati kebutuhan akan pendidikan, dan bantuan pendidikan gratis ini sangat bermanfaat. ( Wawancara dengan HR 16 Maret 2018).

Dari hasil wawancara di atas bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan gratis adalah penyelenggaraan program pendidikan untuk rakyat sebagai wujud layanan pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua siswa dari pungutan biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan SD samapai SMA. Penggunaan ini harus dilakukan secara transparan kepada masyarakat dan pemanfaatannya sesuai dari dinas pendidikan atau pemerintah.

## **2. Peningkatan Mutu**

Dengan adanya program pendidikan gratis menuntun stakeholder dan semua pihak yang ada didalamnya agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat terutama dalam hal pemenuhan hak hidup untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan, pemerintah menerapkan sistem peningkatan mutu demi

mencapai sebuah kepuasan. Ini dalam bentuk monitoring atau peningkatan mutu dana pendidikan gratis ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Tim monitoring independen: perguruan tinggi, DPRD, tim independen khusus yang ditunjuk oleh pemerintah
2. Unsur masyarakat dari unsur dewan pendidikan, komite sekolah, serta organisasi masyarakat
3. Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah Kabupaten/Kota dan Propinsi

Adapun asas dalam menyelenggaraan pendidikan gratis adalah:

1. Transportasi penyelenggaraan pendidikan gratis dengan senantiasa memenuhi asas kepatuhan serta tata kelola yang baik
2. Akuntabilitas publik penyelenggaraan pendidikan gratis dapat dipertanggung jawabkan segala kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara pendidikan dan pemangku kepentingan (stake holder)
3. Team work adanya proses kerjasama antara para penyelenggara pendidikan dan pemangku kepentingan
4. Cermat dan akurat penyelenggara yang tentunya tepat pada sasaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Terstruktur dan berjenjang penyelenggaraan pendidikan gratis dilaksanakan di jenjang pendidikan dasar dan menengah baik berstatus negeri maupun swasta
6. Kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan program pendidikan gratis untuk meningkatkan mutu penyelenggara dan mutu pendidikan

7. Demokratis musyawarah dan mufakat, pelaksanaan program pendidikan gratis memberikan akses pelayanan pendidikan yang mengutamakan kepentingan masyarakat seluas-luasnya.

Berdasarkan asas penyelenggaraan pendidikan gratis dalam peraturan daerah mencakup transportasi, akuntabilitas publik, team work, cepat cermat dan akurat, kendali mutu dan kendali biaya, serta demokratis, musyawarah dan mufakat.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris dinas pendidikan kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Bone lebih mengutamakan pada pelayanan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan yang tentunya mengacu peraturan yang ada, sesuai kebijakan pemerintah program pendidikan gratis ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat peserta didik dan orang tua/wali peserta didik, hal ini diperlukan untuk membangun masyarakat di daerah masing-masing ke arah kemandirian untuk mencapai kehidupan yang semakin merata dan sejahtera” (Wawancara dengan NL, 05 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dinas pendidikan kabupaten Bone, mekanisme penyaluran pendidikan gratis setelah adanya kerjasama pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Bone, menyalurkan dana bantuan dari pemerintah provinsi melalui BPKD (badan pengelola keuangan daerah) provinsi yang disalurkan ke bagian keuangan pemerintah daerah melalui bank Sulsel, selanjutnya dari pihak sekolah yang akan mendapatkan dana pendidikan tersebut.

Hal senada di sampaikan oleh ketua komite Dinas pendidikan Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Di anjurkan untuk membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kemudian diajukan kepada Team work pendidikan gratis setelah mendapatkan persetujuan maka dana pendidikan gratis akan di salurkan ke masing-masingsekolah, dan setiap sekolah juga akan memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dana tersebut diberikan per 4 bulan (Januari-April), (Mei-Agustus), (September-Desember), namun dalam pelaksanaan terkadang diberikan per semester adapun itu penyaluran dana pendidikan gratis untuk semua sekolah di Kabupaten Bone dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing sekolah” (wawancara dengan UF, 12 Maret 2018).

Dalam menyalurkan subsidi pendidikan gratis diperoleh oleh sekolah dalam usaha untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang ada. Adapun sebagai persyaratan sekolah dalam menerima dana subsidi pendidikan gratis ini adalah:

1. Memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan
2. Wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan gratis
3. Wajib membebaskan seluruh biaya pelaksanaan proses pendidikan di sekolah
4. Sekolah swasta dapat menerima sumbangan berupa sebagai biaya tambahan penyelenggara pendidikan yang diperuntukkan dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis dan atau dana BOS berdasarkan rencana pengembangan sekolah
5. Sekolah dapat menolak bantuan namun persetujuan rapat orang tua murid/siswa dan komite sekolah

Hal senada dengan yang diungkapkan oleh kepala sekolah dalam wawancara yang kami lakukan mengatakan bahwa:

“Pendidikan gratis sangat membantu pihak sekolah maupun seluruh masyarakat di kabupaten Bone, pelaksanaan pendidikan gratis ini berjalan dengan baik, khusus untuk SMA penyaluran dana diberikan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran yang dibuat oleh pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah yang terkait”(Wawancara dengan MJ, 15 Maret 2018)

Dari pernyataan tersebut bahwa pendidikan gratis sangat membantu pihak sekolah SMA dan masyarakat di Kabupaten Bone itu sendiri, dari hal di atas memberikan gambaran bahwa dalam rangka penyaluran dana subsidi pendidikan gratis berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya program pendidikan gratis, ada umpan balik dari semua pihak, termasuk masyarakat. tanpa ada peran serta masyarakat dalam pengelolaan program ini. Jadi intinya semua pihak harus melibatkan diri dalam pengelolaan pendidikan tersebut, proses pendidikan yang dikelola dan di rancang secara bagus, akan menghasilkan kualitas pendidikan yang bisa dibanggakan baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Adapun kesimpulan dari hasil wawancara dengan orang tua siswa selama melakukan penelitian di dinas pendidikan kabupaten Bone, di antaranya hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa yang ada di Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Kami selaku orang tua siswa merasa sangat terbantu dengan adanya program pendidikan gratis, hanya saja kami berharap agar pungutan biaya yang membebani para siswa sudah tidak ada lagi” (Wawancara dengan, RR 15 Maret 2018).

Maka dari itu pihak orang tua sangat berharap agar pendidikan gratis harus lebih diperhatikan dan lebih ditingkatkan khususnya pada masyarakat menengah ke bawah yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Hal senada dengan yang diungkapkan oleh ketua komite dalam wawancara yang kami lakukan mengatakan bahwa:

“Dana pendidikan gratis yang dialokasikan bagi sekolah-sekolah untuk tiap tahunnya, alokasi dana tersebut setiap tahun pelajaran berubah-ubah sesuai dengan jumlah siswa di sekolah. Dana yang kami terima itu masih sangat minim” (Wawancara dengan HR 15 Maret 2018).

Dari data diatas penetapan alokasi anggaran antara satuan pendidikan alokasi anggaranya berbeda-beda setiap tahunnya sesuai siswa yang ada.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat strategi pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone**

Faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan gratis di dinas pendidikan Kabupaten Bone adalah merupakan faktor pendukung dan penghambat strategi. Dalam pendidikan gratis juga mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan dalam srategi program pendidikan gratis yaitu sumber daya manusia kurang dalam hal ini masih banyak terdapat tenaga bantu pada setiap sekolah.

Adapun beberapa faktor pendukung dalam strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan gratis di dinas pendidikan kabupaten Bone sebagai berikut:

1. Faktor pendukung
  - a. Sarana dan prasarana konsekuensi dari penerapan pendidikan gratis tidak hanya berorientasi kepada anggaran gratis semata. Pemerintah

setempat tetap memperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Dalam mewujudkan suatu pelayanan pendidikan yang sangat baik diperlukan sarana dan prasarana sekolah dengan fasilitas yang memadai agar terciptanya suatu pelayanan pendidikan yang baik, sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Bone sudah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masing-masing sekolah SD, SMP dan SMA bahkan ke perguruan tinggi” (Wawancara dengan DT, 19 Maret 2018).

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah Kabupaten Bone tergambar bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi setiap sekolah yang berada di Kabupaen Bone dan memberi bantuan dalam hal pembangunan dan perbaikan masing-masing sekolah.

Hal senada di sampaikan oleh sekretaris Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Pelayanan pendidikan khususnya pembangunan di setiap sekolah telah berjalan dengan baik dan telah dilakukan perbaikan-perbaikan pada gedung sekolah yang rusak namun tidak secara keseluruhan. Pemerintah daerah telah memfasilitasi setiap sekolah yang berada di Kabupaten Bone dan memberikan bantuan dalam hal pembangunan dan perbaikan masing-masing sekolah”(Wawancara dengan RH, 02 April 2018).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Pendidikan Kabupaten Bone menggambarkan bahwa pihak sekolah telah terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, namun pihak sekolah juga berharap agar pelayanan pendidikan dalam hal pembangunan sekolah tetap menjadi prioritas utama pemerintah

Hal senada di sampaikan oleh kepala dinas Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Itensitas sosialisasi dalam pengelolaan anggaran program pendidikan gratis, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pengelolaan anggaran oleh im penghendali pendidikan gratis provinsi dan daerah sangat menunjang kinerja untuk mendistribusikan anggaran sesuai dengan yang diperuntukkan. Oleh karena itu penggunaan anggaran perlu diadakan pelatihan pengelolaan anggarap program pendidikan gratis di masing-masing sekolah dengan bentuk laporan penggunaan anggaran” (Wawancara dengan RH 13 Maret 2018).

Pendapat senada di kemukakan oleh ketua komite mengatakan bahwa:

“Laporan pertanggung jawaban pihak masing-masing sekolah diselesaikan dan distor tepat waktu sehingga penyaluran anggaran program pendidikan gratis pada periode berikutnya tepat waktu. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk laporan pertanggung jawaban tepat waktu”(Wawancara dengan HR 13 Maret 2018).

Kemudian hasil wawancara dengan orang tua siswa mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program pendidikan gratis khususnya di Kabupaten Bone telah dilaksanakan pendidikan gratis, kami selaku orang tua siswa merasa terbantu dengan adanya program ini, besar harapan kami kepada pemerintah agar program lebih ditingkatkan dan kalau bisa sampai ke perguruan tinggi karena dengan melihat ekonomi masyarakat masih pas-pasan” (Wawancara dengan RR 13 Maret 2018).

Hasil wawancara dengan orang tua siswa /Masyarakat dapat digambarkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, namun sebagian orang tua siswa masih mengeluh adanya pungutan yang dilakukan oleh guru sekolah yang membebani siswa untuk membayar fotocopy, dan buku.

- b. Memiliki sumber daya biaya yang cukup untuk membantu menjalankan program pendidikan gratis, pendidikan gratis ini yaitu

sumber daya manusia dalam hal ini masih banyak terdapat tenaga bantu pada setiap sekolah.

Adapun hasil wawancara dengan kepala Dinas di dinas pendidikan kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Program pendidikan gratis ini memberikan pelayanan masyarakat dengan adanya bantuan dana gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik dan sekaligus peningkatan kompetensi dan kinerja guru, serta kualitas pendidikan kami pun berharap agar pemerintah tetap memperhatikan pendidikan di Kabupaten Bone khususnya tenaga pendidik sebab masih banyak terdapat tenaga honor maupun PNS yang membutuhkan pelatihan maksimal sesuai dengan bidang peajarannya” (Wawancara dengan IY, 17 Maret 2018).

Hal senada di sampaikan oleh kepala sekolah Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Tidak dapat dipungkiri anggaran menjadi salah satu prioritas utama berjalannya suatu kegiaa di setiap sekolah di tunjang dengan penyaluran anggaran tepat waktu, sehingga seluruh program yang ada di sekolah dalam item anggaran pendidikan gratis tersebut dapat terlaksana dengan baik” (Wawancara dengan MJ 14 Maret 2018).

Pendapat senada dikemukakan oleh ketua komite mengatakan bahwa:

“Anggaran program pendidikan gratis disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah, hal ini berarti di setiap sekolah unuk mengajukan program yang sifatnya membangun kepada pemerintahan yang membidangi anggran pendidikan gratis untuk mempertimbangkan agar pemerintah mengetahui secara detail kebutuhan yang ada di setiap sekolah” (Wawancara dengan HR 17 Maret 2018).

Begitu pula hasil wawancara dengan orang tua siswa mengatakan bahwa:

“Optimalisasi pendidikan gratis sangat menunjang efektifitas dan efesiensi pengelolaan anggaran di sekolah, meskipun pihak sekolah selalu terbuka dalam pengelolaan anggaran pendidikan gratis namun hanya terbatas sehingga orang tua siswa lain juga merasa perlu untuk pengawasi proses pengelolaan anggaran tersebut” (Wawancara dengan RR 17 Maret 2018).

Hal senada di sampaikan oleh sekretaris Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Sistem suatu kebijakan harus ditingkatkan khususnya program pendidikan gratis agar pengelolaan dan pengalokasian anggrannya tepat” (Wawancara NL 16 Maret 2018).

## 2. Faktor penghambat

Dalam hal ini dapat juga digambarkan faktor penghambat yang mempengaruhi strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan gratis di dinas pendidikan Kabupaten Bone adalah:

Fakor komunikasi yang tentunya telah memberikan pengaruh terhadap sekolah sebagai pelaksana kebijakan dimana peraturan daerah yang menjadi pedoman teknis kebijakan tersebut, dan sumber daya yang terkait langsung dalam kebijakan ini merupakan tanggung jawab terhadap strategi program pendidikan gratis pemerintah mengatur pengeluaran anggaran tersebut.

Hal senada di sampaikan oleh kepala dinas Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat program pendidikan gratis adalah terletak di pihak sekolah yang terlambat mengumpulkan laporan peranggungjawaban (LPJ) pada setiap periode, sehingga penyaluran pada periode yang berikutnya menjadi terhambat. Hal itu terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompoten untuk membuat laporan pertanggung jawaban yang berkualitas” (Wawancara RH 22 Maret 2018).

Hal senada di sampaikan oleh kepala sekolah Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Kendala utama program pendidikan gratis yaitu minimnya anggaran pendidikan gratis, meskipun besaran anggran pada setiap sekolah di enukan dri jumlah siswa di sekolah tersebut. Alokasi anggraran pendidikan gratis yang ada selama ini sudah membantu menutupi kebutuhan biaya program pendidikan gratis

dengan banyaknya siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana atau juga banyak orang tua siswa tidak mampu” (Wawancara dengan MJ 21 Maret 2018).

Hal senada di sampaikan oleh ketua komite Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Program pendidikan gratis salah satunya adalah penyaluran anggaran atau pencairan anggaran tidak tepat waktu ke masing-masing sekolah. Penyaluran anggaran tidak tepat waktu sangat berefek pada ketidak tepatan perencanaan program pendidikan terutama program yang alokasi anggarannya menggunakan anggaran pendidikan gratis” (Wawancara dengan HR 21 Maret 2018).

Hal senada pula di sampaikan oleh orang tua siswa Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Pemerintah provinsi dan kabupaten /kota adalah ujung tombak pelaksanaan program pendidikan gratis karena peranan keduanya sangat urgen dan harus saling mendukung karena suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif jika keduanya tidak bekerja sama. Meskipun pendidikan gratis adalah program kebijakan daerah, tetapi dukungan dari pemerintah pusat tetap saja diperlukan, karena pendidikan merupakan masalah nasional dan menjadi prioritas utama dalam suatu negara. majunya suatu negara sangat tergantung pada sejauh mana peran pemerintah terhadap pengelolaan pendidikan yang berkualitas, terutama pembebasan biaya bagi siswa yang tidak mampu” (Wawancara dengan RR 25 Maret 2018).

Program pendidikan gratis yang sifatnya program bagi pemerintah Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Bone sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar tujuan terselenggaranya program ini dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dari segi faktor komunikasi berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dinas pendidikan kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Komunikasi antara pihak sekolah dengan pemerintah sudah cukup baik dan pelaksanaan pendidikan gratis di setiap sekolah sudah terlaksana dan sangat membantu masyarakat utamanya masyarakat yang kurang mampu, khusus untuk tenaga pendidik satu bulan sekali diberikan pelatihan sesuai dengan

bidangnya masing-masing sehingga sangat membantu pihak sekolah yang ada di Kabupaten Bone”(Wawancara dengan NL, 30 Maret 2018).

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa proses komunikasi antara pihak sekolah dengan pemerintah berjalan sesuai dengan keentuan yang ada, adapun itu pihak sekolah merasa terbantu karena setiap bulannya dilakukan pelatihan tenaga pendidik sesuai bidangnya masing-masing upaya dalam meningkatkan kualitas SDM pelaksanaan pendidikan gratis akan dapat berjalan dengan baik yang tentunya di dukung oleh seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan baik pemerintah maupun masyarakat pendidikan gratis kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pemahaman yang lain ditingkat masyarakat dalam melihat program pendidikan gratis ini. Dalam pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabupaten Bone dapat berjalan dengan baik yang tentunya didukung oleh seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan baik pemerintah maupun masyarakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan gratis di dinas pendidikan Kabupaten Bone maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pemerintah yang dilakukan dalam program pendidikan gratis di Dinas pendidikan Kabupaten Bone adalah melalui strategi pengembangan kapasitas pendidikan gratis dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan semua anak didik tanpa terkecuali harus menggendong pendidikan pelaksanaan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 yakni "...mencerdaskan kehidupan bangsa". Strategi ke dua peningkatan mutu dengan adanya program pendidikan gratis menuntut stake holder dan semua pihak yang ada dalam pelayanan pendidikan mendapatkan sistem peningkatan mutu demi mencapai sebuah pendidikan yang efektif dan efisien.
2. Faktor pendukung yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan program pendidikan gratis karena peranan keduanya sangat urgen dan harus saling mendukung karena suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif jika keduanya tidak bekerja sama. Meskipun pendidikan gratis adalah program kebijakan daerah, tetapi dukungan dari pemerintah pusat tetap saja diperlukan, karena pendidikan merupakan masalah

nasional dan menjadi prioritas utama dalam suatu negara. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan adanya komunikasi maka erjadilah hubungan sosial. Karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial maka erjadilah interaksi timbal balik.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Diharapkan agar perlunya meningkatkan secara efektif dan efesien pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu dalam pelayanan pendidikan
2. Perlu adanya dilakukan peningkatan pendidikan pemerataan dan peningkatan mutu dengan melalui pelayana pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

## Daftar Pustaka

- Abulding, Nata. 2014. *Strategi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Agung, Santoso. 2010. *Study Deskriptif Effect Size Penelitian-penelitian Di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma*. Jurnal Penelitian
- Andang. 2014. *Konsep Strategi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Arief, Subyantoro. 2010. *Metode dan Teknik Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Asmoko, Hindri. 2010. *Perancangan Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: UGM Press
- Handoko, Hani. 2009. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Herujito. 2012. *Elektronik Government, Strategi Pengembangan Berbasis Teknologi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Imron Ali. 2009. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kencana, Inu. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Mukhtar. 2013. *Good Governance*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurmatalasari. 2013. *Strategi Pemerintah*. Jakarta: Erlangga
- Purwanto, Ngalim. 2014. *Administrasi dan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sondang. 2012. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suwarsono, Muhammad. 2009. *Strategi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Andi

Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2013

## Daftar Riwayat Hidup



Penulis dari skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone” Nama lengkap HAFSA SADIA putri bungsu dari 3 bersaudara, anak dari pasangan Andi Dika dan Petta Baji. Lahir pada tanggal 22 November 1990.

Penulis mengawali pendidikan formal di sekolah dasar 290 Bulusirua kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, tamat pada tahun 2003, di tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan ke MTs Toasae Desa Bulusirua Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2005. Dan pada tahun 2007 saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bontocani Kabupaten Bone yang sekarang berganti nama menjadi SMA 23 Bone dan tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2013.

Selama mendapat status sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, penulis aktif di organisasi ekstra. Organisasi ekstra yang pernah saya masuki adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP).